

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Alamsyah, 2003, *Membangun Masyarakat Berwawasan Lingkungan*, Pikiran Rakyat, Bandung.

Emil salim, 1992, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hartiwiningsih, 2007, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.

Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Pustaka Mandiri, Tangerang.

Otto Soemarwoto, 2014, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Otto Soemarwoto, 1988, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Prihantoro Laksmi., 1989, *Manusia dan Lingkungan Hidup*, FMIPA IKIP Bandung, Bandung.

Rachmad K. Dwi Susilo, 2012, *Sosiologi Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suratmo F. Gunawan, 1991, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Taufik Imam Santoso, 2009, *Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administratif*, Setara Press, Malang.

Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Artikel

PT. Muara Wisesa Samudra. 2013, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan", Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945. Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pencemaran atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara.

Internet

Anonim, "Pengertian Reklamasi Tujuan dan Sistem Reklamasi", diakses dari <http://www.radarplanologi.com/2016/04/pengertian-reklamasi-tujuan-dan-sistem.htm>, 21 April 2016.

Haryo Damardono, "Perjalanan Panjang Reklamasi Jakarta", diakses dari <http://interaktif.print.kompas.com/reklamasijakarta>, 7 Desember 2014.

Modul Terapan: Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi pantai. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Modul Terapan: Modul Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Perencanaan Ruang Laut Direktorat Kelautan dan Perikanan.